



Penerapan Proses Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Perencanaan dan Penganggaran (Studi Kasus Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Bidang Perdagangan dalam Negeri)

Dian Novitri

Mahasiswi, Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: diannovitri11@gmail.com

Budi Dharma

Dosen, Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: budidharma@uinsu.ac.id

Abstract. *The aim of this research is to determine the implementation of the process management system in planning and implementing budgets at the Ministry of Industry and Trade, North Sumatra Province. The research method used is descriptive qualitative, or a comprehensive problem solving procedure, which presents information obtained from interviews, literature reviews and field observations, which is then analyzed and interpreted through conclusions. Research Results In general, the management control system process is said to be successful if management is able to ensure that the company receives the necessary resources and is able to use them effectively and efficiently. In other words, the process can be said to be successful if the plans prepared by management can actually be implemented and the existing monitoring system can correct deviations that arise in time. Therefore, it is necessary to pay attention to the characteristics and stages of the system itself. In this case, it can be said that the development of the entire management control system process is expected to occur when responsibility is concentrated in easily monitored organizational units (e.g. departments, subdivisions, etc.) and with an effective and functional reporting system. can run well.*

Keywords: *Management Control System, Planning and Budgeting.*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi sistem manajemen proses dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, atau prosedur pemecahan masalah secara komprehensif, yang menyajikan informasi yang diperoleh dari wawancara, tinjauan pustaka, dan observasi lapangan, yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan melalui kesimpulan. Hasil Penelitian Secara umum proses sistem pengendalian manajemen dikatakan berhasil jika manajemen mampu memastikan bahwa perusahaan menerima sumber daya yang diperlukan dan mampu menggunakannya secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, proses tersebut dapat dikatakan berhasil jika rencana yang disusun oleh pihak manajemen benar-benar dapat dilaksanakan dan sistem pengawasan yang ada dapat memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang muncul pada waktunya. Oleh karena itu, perlu memperhatikan karakteristik dan tahapan dari sistem itu sendiri. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa pengembangan seluruh proses sistem pengendalian manajemen diharapkan terjadi ketika tanggung jawab terkonsentrasi pada unit organisasi yang mudah dipantau (misalnya departemen, subdivisi, dll.) dan dengan sistem pelaporan yang efektif dan fungsional. dapat berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Manajemen, Perencanaan dan Penganggaran.

PENDAHULUAN

Dalam sistem penganggaran, setiap pengeluaran sumber daya anggaran harus mempunyai acuan dan kerangka acuan yang jelas mengenai alasan dibuatnya suatu pos anggaran, dalam hal ini proses perencanaan dan penganggaran memerlukan suatu sistem pengendalian manajemen untuk menjamin bahwa apa yang direncanakan dan dianggarkan terlaksana secara efektif dan efisien. Anthony dan Reece (1984:824) mendefinisikan sistem pengendalian manajemen sebagai suatu sistem yang bertugas memantau seluruh aktivitas dalam suatu perusahaan untuk menentukan strategi yang tepat untuk melaksanakan dan mencapai tujuan perusahaan. Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan operasional pemerintah adalah dengan melihat seberapa besar kemampuan pemerintah dalam menggunakan anggaran yang diusulkan dalam APBD. Pemanfaatan anggaran merupakan ukuran kinerja keuangan pemerintah provinsi yang menggambarkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah kota juga memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk mencapai tujuan organisasinya. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah kota agar dapat mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan lebih menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai instansi yang bertanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, OPD mempunyai visi dan misi yang selaras dengan visi dan misi daerah, melaksanakan program aksi sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disajikan dalam laporan keuangan OPD yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun pelaksanaan kegiatan program masih memiliki tingkat pelaksanaan anggaran yang tidak mencapai tujuan, dan sumber daya anggaran terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran.

TINJAUAN TEORITIS

Saudi (1999: 8-9) mendefinisikan sistem informasi manajemen sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yang saling berhubungan, seperti pemrograman, penganggaran, akuntansi, pelaporan, dan tanggung jawab untuk mempengaruhi orang lain dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan bisnis secara efisien dan efektif melalui strategi yang ditentukan. Pengembangan manajemen dan pengembangan operasional adalah dua kategori kegiatan pengembangan manajemen yang terpisah. Optimalisasi manajemen bertujuan untuk mencapai optimalisasi operasional secara menyeluruh agar dapat melaksanakan strategi bisnis secara efektif dan efisien. Perencanaan operasional dibatasi pada pelaksanaan tugas-tugas tertentu dengan cara yang mahir dan berhasil. Terlaksananya seluruh fungsi manajemen merupakan hasil pelaksanaan pengendalian

manajemen yang meliputi perencanaan perusahaan, pengorganisasian, koordinasi, pengendalian, dan pelatihan bagi para pelaksana.

Sistem pengendalian manajemen juga dapat diartikan sebagai manajemen secara keseluruhan. Sistem manajemen yang menyeluruh akan menangani setiap aspek operasi bisnis. Proses perencanaan manajemen meliputi pengembangan program, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi proyek, serta penulisan dan analisis laporan. Struktur keseluruhan perusahaan mencakup elemen-elemen seperti struktur organisasi, arus informasi, pusat tanggung jawab dan desentralisasi, metrik keberhasilan, dan motivasi karyawan. Biasanya, di sebagian besar usaha kecil, pemilik atau manajer menjalankan otoritas penuh atas setiap aspek aktivitas sehari-hari. Manajemen memiliki kemampuan untuk mengambil kendali atas proses perencanaan dan penerapan strategi bisnis. Namun, seiring dengan berkembangnya suatu bisnis, manajemennya menjadi tidak mampu menangani operasi komersial secara mandiri.

Untuk memenuhi tanggung jawab tertentu, dia mencari bantuan dari manajer lain dan mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada mereka. Dia sekarang bergantung pada masukan dari manajer lain untuk mengembangkan rencana formal kegiatan perusahaan, daripada hanya mengandalkan kemampuannya sendiri untuk membuat rencana informal. Dalam menjalankan rencananya, ia tidak bisa lagi mengandalkan observasi langsung seperti dulu saat perusahaan masih kecil. Dia membutuhkan kerangka kerja yang lebih ketat untuk mengawasi pelaksanaan strateginya. Istilah "sistem informasi manajemen" mengacu pada kumpulan alat yang khusus dibuat untuk membantu manajemen tingkat senior dalam melaksanakan tugas-tugas seperti perencanaan dan peramalan. Manajer memanfaatkan berbagai komponen sistem manajemen untuk memberikan pengaruh terhadap karyawan lain, memastikan penerapan strategi bisnis yang efektif dan efisien. Definisi ini mengandung tiga istilah penting: sistematis, efisien, dan efektif.

METODOLOGI PENELITIAN

Permasalahan penelitian ditangani dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pengumpulan data melalui wawancara, analisis dokumen, dan observasi lapangan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan dijelaskan untuk memberikan solusi komprehensif atas permasalahan tersebut. Analisis dilakukan sebelum masuk, di lokasi, dan setelah penutupan, dengan penekanan khusus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi di Provinsi Sumatera Utara. Selama diskusi perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akademisi memeriksa jawaban yang diberikan oleh sumber utama terhadap pertanyaan yang diajukan. Peneliti dapat terus melakukan penyelidikan sampai mereka memperoleh informasi yang

mereka anggap dapat dipercaya, meskipun analisis awal memberikan hasil yang tidak memuaskan. Model analisis data yang digunakan mengikuti proses siklus yang mencakup reduksi data, sintesis data, dan ekstraksi kesimpulan dan/atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis implementasi proses sistem pengendalian manajemen dalam proses kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan teori proses sistem pengendalian manajemen yang dikemukakan oleh Supriyono (2000) melalui beberapa tahapan: Pengembangan program, Penyusunan anggaran, Anggaran implementasi pengendalian, Pengukuran kinerja, Pelaporan dan analisis Penjelasan selengkapnya disajikan di bawah ini.

Komponen Aplikasi Perangkat Lunak Baru Perencanaan dan penganggaran kegiatan APBD tahun anggaran 2022 pada Kementerian Perindustrian dan Perdagangan direvisi dengan cara sebagai berikut Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah; (2) Penyusunan usulan anggaran daerah Rencana Kerja Bidang PDN Proses perencanaan APBD didasarkan pada jadwal kegiatan dan kegiatan yang telah ditetapkan. Proses perencanaan SKPD terdiri dari dua komponen utama: rencana strategis lima tahunan (Renstra) dan rencana operasional tahunan (Renja). Proses perencanaan pada tingkat unit organisasi dan pemerintahan dapat dibagi menjadi beberapa komponen sebagai berikut:

- a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) menyusun rencana kerja tahunan (Renja) yang menguraikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan pedoman untuk memajukan daerah, dengan tetap mempertimbangkan konteks lokal. Strategi pertumbuhan berkelanjutan dan diperluas (RPJMD).
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menetapkan arah kebijakan fiskal daerah, strategi pembangunan, dan kebijakan secara keseluruhan. Kegigihan dan keterampilan; kuda Energi.
- c. Pemerintah daerah menyusun RKPD atau rencana kerja pemerintah daerah dengan memanfaatkan rencana Renja SKPD satu tahun dan mengacu pada rencana Renja nasional.
- d. Renja SKPD merupakan rencana strategis pembangunan SKPD yang disusun dengan menganalisis keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di masa lalu.
- e. Komite Perencanaan dan Pembangunan Daerah (RKPD) menawarkan struktur komprehensif untuk menyusun strategi perluasan, kemajuan, dan kewajiban ekonomi

daerah. Hal ini mencakup perumusan strategi operasional dan alokasi keuangan yang sesuai, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah atau tidak langsung dengan mendorong keterlibatan masyarakat.

- f. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- g. Proses realokasi RKPD dipercepat pada akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
- h. Pembentukan RKPD diatur dengan peraturan yang dikeluarkan oleh kepala daerah setempat.

Penyusunan Anggaran

Proses penganggaran harus dikoordinasikan dengan baik antara sektor PDN dan bagian perencanaan program Sekretariat untuk memastikan bahwa dana dialokasikan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan (seperti KUA dan PPAS).peraturan.Anggaran berbasis kinerja ini dinegosiasikan dengan mempertimbangkan:

- a. Indikator Kinerja Pencapaian atau ukuran kinerja;
- b. Analisis Standar Belanja (ASB).
- c. standar satuan kerja; Dan
- d. Standar pelayanan minimal.

Melalui sistem SIPD online pemerintah Kemendagri, PDN menyediakan rencana operasional dan anggaran untuk proyek-proyeknya, memberikan pengguna informasi yang jelas tentang tujuan proyek, dasar pemikiran, dan hubungan antara anggaran proyek (termasuk gaji dan overhead karyawan) serta manfaat dan hasil proyek. Setelah disetujui dan diselesaikan, menjadi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA-SKP).

Oleh karena itu, penganggaran berbasis kinerja mengharuskan kepala departemen PDN bertanggung jawab atas proses yang mereka awasi dan sumber daya yang mereka alokasikan.

Langkah selanjutnya adalah Ketua PDN selaku direktur pelaksanaan teknis berkoordinasi dengan bagian keuangan stadion untuk menyiapkan anggaran rinci untuk seluruh acara yang direncanakan. Prosedur alokasi anggaran yang lebih baik Langkah selanjutnya setelah membuat anggaran adalah mengalokasikan dana yang sesuai. Agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien, diperlukan pelatihan.

Pengukuran kinerja

Penyusunan program dan anggaran bidang perdagangan internal diidentikkan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja bawahan pada unit pengendalian di bawah pusat pertanggungjawaban.

Pada tahap ini anggaran dibuat oleh Kepala Departemen PODN dan penanggung jawab pengelola keuangan berdasarkan hasil laporan kinerja keuangan dan material tahunan sehingga dapat dijadikan sebagai dokumen perbaikan.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, proses suatu sistem pengendalian manajemen akan dianggap berhasil jika manajemen dapat memastikan bahwa perusahaan akan mendapatkan sumber daya yang diperlukan dan dapat menggunakannya secara efektif dan efisien.

Dengan kata lain, proses dapat dikatakan berhasil jika rencana yang disusun oleh manajemen benar-benar dapat dilaksanakan dan jika sistem pengawasan yang ada mampu memperbaiki penyimpangan yang muncul pada waktu yang tepat. Untuk itu perlu memperhatikan karakteristik dan fase dari sistem itu sendiri.

Berkenaan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa dengan mengelompokkan tanggung jawab ke dalam unit-unit organisasi yang mudah diikuti (misalnya departemen, divisi, dll) dan disertai dengan sistem pelaporan yang efektif dan efisien, maka seluruh proses pengendalian manajemen sistem akan berjalan dengan baik. dapat berjalan dengan baik.

REFERENSI

Abdul Halim dkk, 2009, Sistem Pengendalian Manajemen, Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.

Anthony, R. N. dkk, 2003, Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi 1, Buku 2, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Moleong, Lexy J, 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Rusiadi dkk, 2014, Metode Penelitian Manajemen, Penerbit Katalog Dalam Terbitan (KDT), Medan

(UU, Permendag, Peraturan BAPEBBTI)

<http://syukriy.wordpress.com/2009/12/25/rendahnya-serapan-apbd-apa-akarmasalahnya/>